



Buletin Parlementaria

Nomor 1221/III/X/2022 • Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan Harus Diusut Sampai Tuntas



3 Suporter
Olahraga Berhak
Peroleh Jaminan
Keselamatan



4 Kunjungi Lanud
Soewondo,
Komisi I Singgung
Kesejahteraan
Prajurit



9 772614 339005



Media
DPR RI



FOTO: CAS/PDT

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Stadion Kanjuruhan Malang, Provinsi Jawa Timur, Kamis (13/10).

Tragedi Kanjuruhan Harus Diusut Sampai Tuntas

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa banyak hal yang jadi temuan penting Komisi III DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Stadion Kanjuruhan Malang, antara lain standar operasional yang dilakukan khususnya penembakan gas air mata ke tribun, lalu jumlah kapasitas penonton dan undangan tiket yang disebar, itu semua harus diusut sampai tuntas.

"Tetapi yang paling penting adalah kami (Komisi III DPR RI) menginginkan agar kasus ini dapat diusut sampai tuntas dan kalau kita melihat keinginan pemerintah juga sama yaitu dengan dibentuknya

tim pencari fakta," ujar Adies saat diwawancarai usai melakukan kunjungan kerja spesifik ke Malang, Provinsi Jawa Timur, Kamis (13/10).

Politisi Dapil Jawa Timur I itu meminta agar semua pihak baik itu dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kemudian dari pihak keamanan harus sama-sama bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan tersebut yang sudah banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia dan luar negeri.

"Kami ingin supaya semua pihak termasuk pihak kepolisian untuk menjalin komunikasi kembali dengan pihak Aremania, dan juga menjadi pengalaman bagi Polri dimanapun berada, karena semua daerah ada

suporter dan ada pemainnya jadi cobalah tunjukkan cara berkomunikasi, bersosialisasi dan bersilaturahmi yang baik agar tidak ada miskomunikasi antara masyarakat dan pihak Polri," ungkap Adies.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu berharap agar Kepolisian dapat menunjukkan kerja-kerja baik dari pengalaman yang cukup luar biasa dan memukul hati itu. "Jadi coba dibuat suatu standar operasional yang baru agar pengalaman buruk ini tidak terulang kembali. Kami terus memantau dan akan melakukan rapat dengan Kapolri untuk mencari solusi penyelesaian kasus ini dan juga meminta agar kasus ini diusut sampai tuntas," tegas Adies.

Komisi III DPR RI bersepakat tragedi tersebut harus diusut tuntas agar tidak terjadi hal serupa dikemudian. Selain itu, Adies berharap, proses hukum yang sedang berlangsung harus segera ditugaskan agar tidak menjadi preseden buruk ke depannya. Dalam kunjungan ini rombongan melihat langsung kondisi pintu keluar yang disebut-sebut yang banyak memakan korban jiwa. ● **cas/aha**



Suporter Olahraga Berhak Peroleh Jaminan Keselamatan

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan suporter pertandingan olahraga dilindungi oleh negara melalui UU 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan. Hal ini disampaikan Puan terkait bertambahnya korban luka Tragedi Kanjuruhan menjadi 714 orang, termasuk korban meninggal dunia sebanyak 131 jiwa.

"Kami menyesalkan peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sehingga menyebabkan banyak nyawa melayang dan warga terluka, bahkan termasuk perempuan serta anak-anak," kata Puan dalam keterangan tertulisnya kepada

Parlementaria, Senin (10/10).

Sebagai informasi, sebanyak 131 orang meninggal akibat berdesakan setelah polisi yang bertugas menembakkan gas air untuk membubarkan penonton. Padahal, menurut Puan, dalam pasal 54 UU Keolahragaan tercantum kewajiban penyelenggara memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan olahraga.

Suporter, menurutnya, berhak mendapatkan pembinaan dari organisasi atau badan hukum suporter olahraga yang menaunginya. Selain itu, mereka memperoleh kesempatan prioritas

memiliki klub melalui kepemilikan saham sesuai peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, DPR meminta Pemerintah menegakkan aturan dengan segera menerbitkan peraturan turunan UU Keolahragaan. "Kita juga harus memikirkan luka batin para ibu, ayah, dan keluarga yang kehilangan anak-anak serta sanak saudara mereka. Ini penting agar tidak meninggalkan trauma mendalam yang akan berdampak terhadap kemajuan sepakbola Indonesia," tutup Puan. • **pun/aha**



FOTO:ENO/PDT

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani.



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Agung Hidayat, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Prima Danutirto, A.Md, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.M.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Ridwan Budiman, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destiantil, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom, Ubald Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firista Dysie, Balggy Maeshnytha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfiqar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerardi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M, Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widjowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Yudi Kresna

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Kunjungi Lanud Soewondo, Komisi I Singgung Kesejahteraan Prajurit

Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo di Medan, Sumatera Utara pada Senin (10/10). Pada kesempatan tersebut Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI yang diketuai oleh Anton Sukartono Suratno sempat mempertanyakan kesejahteraan prajurit yang bertugas di pangkalan TNI AU tersebut khususnya masalah perumahan.

"Kita di Komisi I ada dua Panja; Panja Kesejahteraan Prajurit dan Panja Alutsista. Nah tadi teman-teman menanyakan soal lauk pauk masalah perumahan. Kita tahu bersama,

rumah dinas tidak dapat memenuhi (kebutuhan) semua prajurit yang ada di daerah penugasan," ujar Anton saat memimpin rapat.

Dihadapan para perwira dan prajurit Lanud Soewondo, politisi Partai Demokrat tersebut menjelaskan bahwa Panitia Kerja (Panja) Kesejahteraan Prajurit tak hanya memperjuangkan kesejahteraan saat prajurit TNI bertugas namun saat purna tugas. Menurutnya sudah seharusnya ada perhatian lebih bagi para prajurit yang telah melaksanakan pengabdian bagi negara.

"Bagaimana setelah bertugas? Dua bulan diusir dari rumah dinasnya

kalau mereka (prajurit) berbakti kepada negara 20-30 tahun kepada negara itu kan tidak manusiawi. Maka Panja Kesejahteraan Prajurit (memperjuangkan) nggak cuma saat menjabat sebagai prajurit tapi setelahnya, pasca-nya bagaimana?" kata anggota dewan dari daerah pemilihan Jawa Barat V itu.

Untuk menegaskan keseriusan dan kepedulian Komisi I terhadap kesejahteraan prajurit, pada rapat tersebut Anton bahkan meminta Komandan Lanud Soewondo, Kolonel Pnb Reka Budiarsa untuk tak ragu mengirimkan data kondisi dan kebutuhan bagi prajurit yang dipimpinya. Ia menegaskan ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam memenuhi kesejahteraan prajurit termasuk bagaimana anak-anak mereka bisa bersekolah dengan penghasilan yang diterima dari negara.

"Kami benar-benar peduli, jadi jangan (ditanya) cukup? (dijawab) 'siap cukup' semua orang jawabnya siap cukup aja pak. Jadi nggak perlu dijawab sekarang, jawabnya tertulis aja Pak. Nggak perlu pakai nama juga Nggak apa. Yang penting kami tahu apa sih kebutuhan prajurit? Uang lauk pauk Rp70 ribu apa cukup pak?" tegas Anton. • **uc/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Ketua Tim Kunker Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratno saat bertukar cenderamata usai melakukan kunjungan kerja ke Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo di Medan.

Sediakan Saluran Telekomunikasi pada Desa Terkategori 'Blank Spot'



FOTO: WE/PDT

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon saat bertukar cenderamata usai Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di Aceh, Senin (10/10).

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon meminta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) agar dapat melakukan strategi penyediaan saluran telekomunikasi dasar khususnya pada area prioritas di Provinsi Aceh, yakni 149 desa yang terkategori blankspot. Untuk itu, Effendi meminta BAKTI segera menginventarisasi masalah tabulasi tabel yang nantinya akan dibahas kembali dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

"Kita dengar dari seluruh Kadis (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika) di Kabupaten/ Kota dan Provinsi Aceh yang

”

BAKTI LUAR BIASA BEKERJA, KITA APRESIASI, MEREKA MELAKUKAN SESUAI AMANAT UNDANG-UNDANG DAN AMANAT DARI PRESIDEN JOKOWI YANG MENCAKUP SELURUH WILAYAH INDONESIA

hadir, dimana pembangunan khususnya jaringan internet dan BTS untuk mencapai hasil yang menggembirakan ada beberapa

catatan di setiap kabupaten yang masih harus dibenahi, baik oleh BAKTI, oleh pemerintah maupun juga oleh operator lainnya dan itu kita masukkan dalam tabulasi tabel yang kita akan diskusikan nanti dengan pemerintah," jelas Effendi dalam Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di Aceh, Senin (10/10).

Meski demikian, Politisi Fraksi PDI-P ini mengapresiasi kinerja BAKTI, yang menurutnya sudah sangat bekerja keras dalam rangka pembangunan infrastruktur dan penyediaan akses internet di 22 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. "BAKTI luar biasa bekerja, kita apresiasi, mereka melakukan sesuai amanat undang-undang dan amanat dari Presiden Jokowi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Ini jaringannya luar biasa dan kita akan dukung terus BAKTI dengan mitranya bisa melayani seluruh wilayah Indonesia khusus di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)" tambahnya.

Senada dengan Effendi, Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menyatakan ke kekhawatirannya terhadap 149 desa yang sama sekali tidak memiliki akses telekomunikasi. Untuk itu ia menekankan agar pemerintah Provinsi Aceh bekerja sama dengan Kemkominfo untuk mendata status 3T di 149 desa ini.

"Kalau memang masuk dalam kategori 3T maka harus segera di prioritaskan oleh kemkominfo agar diberi atau diupayakan pemasangan jaringan telepon. Sedangkan yang tidak masuk dari 149 Desa ini maka harus diupayakan agar operator masuk dan melaksanakannya," tutup politisi Fraksi Partai NasDem ini. ● **we/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya





FOTO: GAL/PDI

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait evaluasi tenaga kerja honorer di Kabupaten Semarang.

Harus Ada 'Win-Win Solution' Agar Tak Ada Gempa Massal Tenaga Honorer

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan harus berani membuat terobosan *win-win solution* untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Ia juga menyebut penghapusan tenaga honorer itu dengan istilah 'gempa massal November 2023'.

"Dengan gempa massal November 2023, di mana tidak ada lagi honorer, bisa kita hindari dengan *win-win solution*. Masyarakat ingin mendapatkan keadilan untuk bekerja. Pemerintah daerah perlu orang untuk melayani. Pemerintah pusat perlu untuk menjaga NKRI kita agar stabil," ujar Mardani usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait evaluasi tenaga kerja

honorer di Kabupaten Semarang, di Ungaran, Jawa Tengah, Selasa (27/9).

Mardani optimis masalah tenaga honorer bisa diselesaikan, jika semua pihak menurunkan ego dan berkolaborasi, termasuk Kementerian Keuangan dengan Kementerian PPN/Bappenas. Walaupun, beban terberat berada pada Presiden, kebijakan penghapusan honorer tahun 2023 perlu dicermati. Sebagai contoh, ditemukan persyaratan PPPK menggunakan ijazah di Semarang. Padahal, sebagian Pemda memerlukan tenaga honorer yang terkadang tidak memerlukan ijazah, akan tetapi cukup keahliannya seperti tukang sapu, sopir, dan pembantu umum.

Melalui, kunjungan kerja Komisi II di Kabupaten Semarang ini, Mardani

menghimpun banyak masukan terkait dengan permasalahan tenaga honorer di daerah, khususnya di Kabupaten Semarang. Di antaranya, dari 7.194 orang ASN yang ada, hampir 50 persen telah memasuki usia lebih dari 50 tahun yang akan pensiun, kemudian dari sebanyak 4.804 tenaga honorer yang ada, hanya ada 2.238 orang yang memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi PPPK.

"Yang akhirnya masyarakat pengen semangat tapi Pemdanya berat, karena APBD-nya berat, DAU-nya *enggak* bertambah. Sehingga buat kami ini masukkan yang sangat berharga agar kedepannya kebijakan itu betul-betul empiris bukan cuma akademis," tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu.

Mardani pun berharap dalam waktu sebelum November 2023 ini pada saat pengangkatan ASN dan PPPK yang baru, perubahan dari persyaratan untuk tenaga honorer sudah bisa dilakukan. "Karena itu mudah kok, karena dia peringkatnya PP, maka antara teman-teman (Kementerian) PAN-RB, Kemendagri, Kemenkumham, mungkin Bappenas bisa berembung segera dan putuskan segera. Kami Komisi II akan full mengawasi," ungkapny. ● gal/es

Scan QR untuk berita selengkapnya





Survei dan Hitung Cepat Pemilu Perlu Ditertibkan

Anggota Komisi II DPR RI Gusparda Gaus mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang keberadaan survei, jajak pendapat dan *quick count* atau penghitungan cepat dari berbagai lembaga survei yang kerap menjadi persoalan tersendiri di tengah-tengah masyarakat, menjelang dan saat Pemilihan Umum (Pemilu). Menurutnya, jajak pendapat memang merupakan sebuah keniscayaan, namun sayangnya terkesan survei ini menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

"Terkesan bahwa survei-survei ini menjadi sesuatu problematika bagi KPU. Jadi, saya duduk di beberapa warung ketika melakukan jajak pendapat dan real count, disana terkesan seolah-olah KPU hanya sekedar alat legitimasi bagi real count, ini kan sesuatu yang salah. Padahal yang benar itu adalah real count KPU, bukan yang diperoleh dari lembaga survei dan pihak lainnya," ujar Gusparda Gaus dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/10).

Politisi Fraksi PAN ini berharap KPU bisa menjawab semua persoalan itu. Ia

berharap KPU bisa menjaga integritas, dengan tidak terpengaruh terhadap berbagai hal tersebut. Oleh karenanya menurut Gaus, perlu ada inovasi, perlu ada langkah-langkah, perlu ada terobosan yang dilakukan KPU.

Pasalnya, sejak beberapa kali Indonesia melakukan pemilihan langsung, dan partisipasi dari lembaga survei diberikan ruang untuk melakukan itu, tapi masyarakat sudah mengabaikan hasil hitungan KPU yang sebenarnya itu yang menjadi dasar penetapan hasil pemilihan. Bukan dari *real count* lembaga atau pihak lain.

"Apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh KPU terhadap persoalan itu. Jangan sampai KPU malah menjadi alat legitimasi *quick count* oleh lembaga survei atau pihak lain. Ini penting, supaya pelaksanaan pemilu itu berintegritas, jujur, adil dan lain sebagainya," ujar Gusparda.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi II DPR RI, lainnya, Mohamad Muraz misalnya. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini berharap masalah survei dan *quick count* ini perlu diatur lebih tertib.

Pasalnya, tidak dapat dipungkiri bahwa *quick count* yang dilakukan oleh lembaga survei dan pihak swasta lainnya ini memang memberi dampak di masyarakat, seperti polarisasi, fitnah-fitnah di masyarakat. Sehingga satu sama lain saling bermusuhan karena *quick count* ini, apalagi dalam ajang pilpres. Oleh karenanya, ia menilai perlu diatur lebih tertib dan lebih baik. • **ayu/aha**

Anggota Komisi II DPR RI Gusparda Gaus.



FOTO: EOT/PDI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggaran di Pengadilan Tinggi Babel Masih Sangat Minim

Anggota Komisi III DPR RI M. Nurdin memperoleh masukan dari mitra kerja Pengadilan Tinggi Bangka Belitung (Babel) terkait kurangnya anggaran di lembaga peradilan tersebut, sehingga membuat operasional dan kebutuhan Pengadilan masih dipinjamkan oleh pemerintah daerah setempat. Bahkan, beberapa fasilitas seperti kendaraan dan rumah masih berstatus pinjaman.

"Kami sudah minta ke Sekma (Sekretaris Mahkamah Agung) sebaiknya pakai anggarannya Mahkamah Agung (MA) untuk bikin perumahan dan operasional lainnya. Itu yang ditekankan dari masukan-masukan yang kami dapat pada hari ini," tutur Nurdin saat selesai

melakukan Kunjungan Kerja Reses dengan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Rabu (5/10).

Nurdin juga menambahkan dalam pertemuan kali ini Komisi III membahas terkait penggunaan anggaran yang diberikan dan rencana program untuk anggaran tahun 2023 mendatang. "Kami menyerap aspirasi mitra kerjanya jadi sekarang ini selain, minta pertanggungjawaban dari anggaran yang sudah diberikan dan rencana penggunaan anggaran yang akan datang juga kendala-kendala atau aspirasi yang disampaikan oleh mitra tentu bisa dilanjutkan ke MA atau ke Sekma," ujar Politisi Fraksi PDIP tersebut.

Nurdin berharap dalam penggunaan Anggaran di tahun 2023 yang akan datang, para mitra kerja dari Komisi III DPR RI bisa menggunakannya dengan maksimal dan sesuai dengan kebutuhan di daerah Bangka Belitung ini. • **aar/aha**



FOTO: AAR/PDT

”

KAMI MENYERAP ASPIRASI MITRA KERJANYA JADI SEKARANG INI SELAIN, MINTA PERTANGGUNG JAWABAN DARI ANGGARAN YANG SUDAH DIBERIKAN DAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN YANG AKAN DATANG

Anggota Komisi III DPR RI M. Nurdin saat Kunjungan Kerja Reses dengan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Rabu (5/10).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Polda & BNNP Kaltim Harus Tingkatkan Sinergi Berantas Narkoba



Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana saat rapat antara Komisi III dengan Kapolda Kaltim Irjen Pol. Drs. Imam Sugianto, M.Si., BNNP Kaltim dan para PJU Polda Kaltim, Kamis (6/10).

Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana meminta Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur (Kaltim) dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltim meningkatkan sinergi memberantas jaringan narkoba yang angkanya masih tinggi di Kaltim. Dalam pertemuan tersebut, Komisi III mendapati kinerja pemberantasan narkoba sudah baik.

"Kaltim itu kan daerah perlintasan yang sangat memungkinkan jaringan narkoba masuk. Untuk itu, pengawasan yang dilakukan Polda dan BNNP perlu terus diperkuat,"

katanya di sela-sela rapat antara Komisi III dengan Kapolda Kaltim Imam Sugianto, BNNP Kaltim dan para PJU Polda Kaltim, Kamis (6/10). Diketahui, berdasarkan

”

**KALTIM ITU KAN
DAERAH PERLINTASAN
YANG SANGAT
MEMUNGKINKAN
JARINGAN NARKOBA
MASUK.**

data Kanwil Kemenkumham Kaltim, bandar narkoba yang ditangkap sebanyak 6775 orang dan narapidana narkoba pengguna sebanyak 681 orang.

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Maheesa mengatakan kunjungan kerjanya di Kaltim dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sistem penegakkan hukum, terutama dalam mencegah maupun melakukan penyelamatan terhadap kebocoran dan lubang di sektor penerimaan negara, khususnya di bidang sumber daya alam (SDA).

"Saya yakin dengan kinerja yang sudah dilakukan oleh Pak Kapolda dan jajarannya di Kaltim berjalan baik, terbukti dengan paparan yang telah disampaikan, semoga kedepannya dapat lebih baik lagi," katanya, seraya menyampaikan Kaltim adalah Indonesia masa depan karenanya para penegakan hukum yang ada di daerah calon Ibu Kota Negara ini perlu terus mempersiapkan diri.

Sebelumnya, Kapolda Kaltim Imam Sugianto memaparkan kinerja dan situasi kamtibmas di wilayah Kaltim. Tidak hanya itu, Kapolda juga menerangkan mengenai penanganan terhadap pencegahan narkoba, Kerjasama dengan instansi terkait, kendala yang dihadapi, penanganan kasus SDA dan lingkungan hidup, pola mencegah kebocoran sektor penerimaan dan penyelamatan keuangan negara, Serta proses pengamanan pembangunan IKN. • **rnm/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



BPTP Harus Adaptif Terhadap Perubahan

Adanya peleburan sejumlah lembaga atau badan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan sejumlah pekerjaan rumah, salah satunya bagi Kementerian Pertanian. Berdasarkan Perpres nomor 117 tahun 2022, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan dihilangkan dan muncul badan baru

yaitu Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

Sayangnya, hingga kini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) belum mengeluarkan keputusan mengenai tugas dan fungsi dari badan tersebut. Begitu pula dengan personil dan anggarannya.

"Untuk itu, melalui forum ini, saya meminta Komisi IV melakukan koordinasi dengan kementerian terkait agar proses keluarnya tugas

dan fungsi itu bisa disegerakan. Agar anggarannya bisa ditetapkan oleh komisi IV," usul Anggota Komisi IV DPR RI Azikin Solthan pada pertemuan dalam kunjungan kerja reses Komisi IV DPR di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu lalu (8/10).

Adanya perubahan badan pada Kementan juga secara otomatis akan berdampak pada tugas dan fungsi unit kerja di bawahnya, termasuk BPTP yang sebagai pelaksana pengkajian, perakitan, pengembangan, dan diseminasi teknologi Pertanian.

Disisi lain, Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip, mendorong agar personel di BPTP, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan agar adaptif terhadap segala perubahan tugas dan fungsi barunya nanti. Menurutnya BPTP harus menyesuaikan diri, melakukan inovasi juga dengan tugas baru sebagai standarisasi dan sertifikasi di sektor pertanian.

"BPTP juga harus menyesuaikan inovasinya dengan pertumbuhan ekonomi, masyarakat dan komunitas-komunitas di sektor pertanian, sehingga standarisasi dan sertifikasi itu bisa kita lakukan dengan tepat untuk mendukung produktivitas pertanian kita," papar I Made Urip.

Sementara itu Anggota Komisi IV lainnya, Darori Wonodipuro, mendorong agar BPTP kedepannya melakukan standarisasi atau penelitian terkait pertanian yang lebih mutakhir. "Misalnya pada padi unggulan, bagaimana petani bisa mendapatkan hasil produksi yang tinggi tapi rasanya enak. Sebab kadang-kadang ada hasil penelitian misalnya produksi padinya tinggi namun rasanya tidak enak atau sebaliknya.

Jadi keduanya harus dikawinkan," demikian Darori. ● **eki/aha**



Anggota Komisi IV DPR RI Azikin Solthan.

FOTO: EKI/PDT



Scan QR untuk berita selengkapnya

Harga Beras Mahal, Dianjurkan Makan Sagu Tapi Potensinya Tak Dikembangkan

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan merespon pernyataan Menteri Pertanian soal harga beras yang terus meroket dan malah menganjurkan masyarakat makan sagu sebagai substitusi dari konsumsi beras. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya menganjurkan substitusi pangan pokok seperti beras untuk pindah ke sagu karena urusan beras ini sensitif dan menyangkut kebiasaan konsumsi turun temurun.

Politisi Fraksi PKS ini menegaskan bahwa seorang menteri Pertanian bertanggung jawab penuh untuk membela kepentingan petani dalam urusan kegiatan Pertanian. "Harusnya ada kebijakan yang membela kepentingan petani agar situasi terus meroketnya harga beras juga berdampak memberi keuntungan kepada petani, namun yang terjadi malah sebaliknya, petani kita tidak menikmati kenaikan harga beras dan hal ini harusnya tugas menteri untuk memperjuangkan nasib petani yang terus terpuruk akibat sistem yang tidak membela petani," cetus Johan dalam rilis mediana ke **Parlementaria**, Jumat (7/10).

Johan juga menilai potensi sagu di tanah air juga belum dikembangkan dengan baik padahal kebutuhan terhadap

sagu juga terus meningkat setiap tahun. "Jadi ini tantangan Kementan ya untuk menjadikan sagu bisa mendukung program pangan alternatif dengan mengembangkan potensi lokal agar menjadi kekuatan pangan lokal, yang tentunya tidak bisa secara tiba-tiba mampu mensubstitusi posisi beras sebagai pangan pokok strategis di tanah air," ujar Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini berharap pemerintah lebih serius mengelola pasar besar di tanah air sebab menurut

Johan, pasar beras adalah pasar yang sensitif terhadap perubahan termasuk ancaman krisis pangan global menjadi faktor pendorong fluktuasi harga beras. "Karena itu saya minta pemerintah segera memperkuat koordinasi dan segera menanggalkan ego sektoral untuk menjaga kestabilan harga beras dan tidak sepenuhnya menyerahkan kepada mekanisme pasar," harap Johan.

Legislator Senayan ini meminta Menteri Pertanian untuk bekerja lebih kuat terutama menjaga manajemen stok beras dan distribusi beras dari daerah surplus ke daerah minus. "Saya mengingatkan pemerintah agar gejolak harga beras ini jangan sampai berkepanjangan karena akan berpengaruh pada terganggunya stabilitas nasional, jangan hanya terpaku pada stok yang cukup namun gagal menjaga stabilitas

harga akan berdampak

pada kondisi masyarakat yang semakin terpuruk," demikian tutup Johan Rosihan. • aha

Anggota Komisi IV DPR RI
Johan Rosihan.



FOTO: ARF/PDT

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Dorong Percepatan Infrastruktur Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mendorong

percepatan infrastruktur serta transportasi di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya. Sebelumnya, Komisi V telah menerima surat dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ciamis agar revitalisasi Stasiun Ciamis dan Pemda Kabupaten Tasikmalaya untuk rehabilitasi Jembatan *Fly Over* KM 256 di Desa Manggungsari.

"Tentu tadi juga ada usulan tambahan dari pemda untuk pembangunan infrastruktur tambahan lain seperti pembangunan jembatan, relokasi pasar dan jalan tol. Untuk itu saya kira akan menjadi perhatian kita kedepan, agar di dalam rapat Komisi V kami akan membawa aspirasi ini menjadi jawaban yang konkret untuk percepatan pembangunan di daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis," ujar Roberth saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi V mengunjungi Kantor Gubernur Jabar, di Bandung, Senin (10/10).

Selain itu, Politisi F-Nasdem ini mengatakan, di Jawa Barat ini ada 32 Program Strategis Nasional (PSN), pihaknya meminta pemerintah pusat untuk segera bisa menyelesaikan proyek-proyek itu sesuai dengan target apa yang telah direncanakan.

FOTO: JKA/PDT



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi V mengunjungi Kantor Gubernur Jabar, di Bandung, Senin (10/10).

"Kita lihat sekarang ini ada 3 waduk yang harus diselesaikan untuk menangani banjir di Jakarta, rencananya 2 waduk akan dibangun di daerah Bogor. Ini harus segera selesai, karena kalau sudah bisa difungsikan itu saya kira bisa mengurangi dampak banjir di Jakarta. Melalui Pemda di Jabar ini memang telah menjadi perhatian mereka juga untuk dapat memberikan

sumbangsih terhadap penanganan banjir di Jakarta," terang Roberth.

Legislator Dapil Papua ini meminta, agar pemerintah memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat sekitar dalam setiap proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun. Misalnya, seperti pembangunan jalan tol yang mengakibatkan rumah makan dan toko-toko lainnya menjadi tidak laku karena sudah tidak dilewati lagi oleh para pengendara.

"Kondisi seperti ini juga perlu kita perhatikan, jangan sampai malah mengakibatkan ekonomi masyarakat di daerah itu hampir hilang. Saya kira ini perlu menjadi perhatian kita bersama dan pemerintah harus ada langkah-langkah untuk mengatasi hal itu, masyarakat yang biasa berdagang dengan adanya jalan tol justru masyarakat jadi tidak bisa berdagang," tutupnya. ● **jka/aha**

”

AGAR PEMERINTAH MEMPERHATIKAN KONDISI EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR DALAM SETIAP PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) YANG DIBANGUN.

Scan QR untuk berita selengkapnya



KIT Batang Buka Peluang Besar Pendapatan Negara dan Lokal

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti berharap pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) bisa menggerakkan roda ekonomi negara maupun masyarakat, khususnya di Kabupaten Batang. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, ia ingin KITB juga membuka potensi lapangan kerja di Indonesia yang lebih besar.

"Kita datang ke sini untuk mendukung kawasan ini. Di mana targetnya ini bisa memberikan pendapatan kepada pemerintah nasional, anggaran nasional dan juga kepada daerah lokal dan

mempekerjakan sebanyak banyaknya untuk para pekerja di Indonesia, sehingga bisnis yang akan terbentuk ini bisa menyokong perekonomian yang ada," ucap Novita kepada Parlemen usai di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke KITB, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Senin (10/10).

Politisi Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu mengakui bahwa mewujudkan KITB menjadi nyata bukan perkara mudah. Walaupun begitu, ia mengapresiasi sekaligus akan konsisten mengawasi pembangunan tahap I KITB seluas 450 hektar, dari total luas lahan sebesar lebih dari 4000 hektar.

"Dengan nilai investasi sementara ini adalah Rp3,1 triliun lebih, Kita akan melihat hasilnya nanti dalam 3 tahun ini, apakah sudah bisa kembali. Semoga ini bisa berjalan dengan lancar dan kita akan memantau progresnya terus sampai nanti ini selesai," tandas Legislator Dapil Jawa Tengah VIII itu.

Sebagai informasi, berdasarkan Perpres Nomor 106 Tahun 2022, KITB telah menyelesaikan pembangunan tahap I. Di antaranya, KITB telah melaksanakan kegiatan pembangunan jalan kawasan; suplesi air baku dan drainase utama klaster I; SPAM, SPAL, dan persampahan; dan rumah susun yang terdiri dari 7 menara. • **ts,rgt/aha**



FOTO: SAM/PDT

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti saat foto bersama usai Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke KITB, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Senin (10/10).

Scan QR untuk berita selengkapnya





FOTO: BIA/AHL

Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J. Rumambi sesaat sebelum pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII dengan rektor dan civitas akademika IAKN Ambon, di Ambon Maluku, Senin (10/10).

Komisi VIII Dorong IAKN Ambon Jadi Universitas

Sebagai salah satu Institut Agama Kristen (IAKN) di Indonesia, IAKN Ambon memiliki peran yang besar dalam hal pendidikan di wilayah timur Indonesia. Untuk itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas J. Rumambi mendorong IAKN Ambon agar nantinya dapat terus bertumbuh dan menjadi universitas.

Sebab, menurutnya perguruan tinggi di wilayah timur Indonesia saat ini masih sedikit jumlahnya, sedangkan semangat anak-anak muda untuk masuk perguruan tinggi sangat tinggi. Sehingga kehadiran IAKN Ambon diharapkan dapat menjadi ruang akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah timur Indonesia.

"*Problem*-nya, universitas negeri di wilayah timur masih sedikit, sementara banyak sekali anak-anak muda yang pengen sekali masuk ke perguruan tinggi, tetapi karena ekonominya kurang mampu, makanya kita harus mendorong kalau ada institut negeri yang akan ditingkatkan statusnya menjadi UKN," jelasnya usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII dengan rektor dan civitas akademika IAKN Ambon, di Ambon Maluku, Senin (10/10).

Terkait dukungan anggaran, Matindas juga mendorong penambahan anggaran-anggaran pendidikan seperti beasiswa dan anggaran penelitian. "Sepanjang ruang APBN kita cukup pasti kami dorong untuk penamaan

anggaran, terutama anggaran-anggaran beasiswa untuk anak-anak berprestasi dan tidak mampu, kemudian anggaran-anggaran buat penelitian, supaya betul-betul perguruan tinggi akan memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi pembangunan bangsa dan negara," imbuhnya.

Terakhir, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini berharap keinginan IAKN Ambon untuk menjadi universitas dapat segera diwujudkan, sehingga akan mempermudah akses pendidikan di wilayah timur Indonesia. "Harapannya ini segera terwujud, karena begitu banyak anak-anak dari kepulauan yang ingin mendapatkan akses pendidikan perguruan tinggi yang murah," tutup Legislator Dapil Sulawesi Tengah tersebut.

Selain bertemu dengan rektor dan civitas akademika IAKN Ambon, tim kunker Komisi VIII juga melihat fasilitas pendidikan yang ada di sana. Salah satunya adalah melihat rumah moderasi beragama yang terdiri dari ruang kapel untuk beribadah, ruang solat dan ruang kampus ministry, serta ruang konseling bagi mahasiswa. • **bia/aha**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Legislator Berharap Pertemuan G20 Nanti Bahas Potensi Hadapi Resesi Ekonomi

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI berharap pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada bulan depan akan membahas kemungkinan resesi ekonomi untuk memperkecil tingkat keparahan yang bisa terjadi kapan saja. Meski demikian ia optimistis bahwa masyarakat Indonesia dapat bertahan menghadapi

kondisi ekonomi yang kurang stabil ini

"Harapannya pada G20 nanti walaupun bukan jadi topik utama akan memperkecil tingkat keparahan ini," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima kepada awak media, Selasa kemarin (11/10). Meski demikian, ia mengatakan kondisi masyarakat Indonesia dipastikan akan mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi yang masih labil akibat pandemi COVID-19.

Wakil Ketua Komisi VI DPR
Aria Bima.

Soal krisis pangan di Indonesia yang banyak dikhawatirkan orang, ia tidak yakin kondisi tersebut akan terjadi. Namun terkait beberapa krisis komoditas dengan harga tidak terkendali kemungkinan itu ada. "Untuk krisis pangan kita lebih punya kemampuan untuk pangan nasional dicukupi produksi sendiri," imbuhnya.

Meski ada beberapa komoditas yang dipenuhi oleh impor dan kenaikan harganya akan mempengaruhi angka inflasi. Aria Bima meminta agar masyarakat tidak perlu pesimistis. "Kita tidak perlu pesimis dan skeptis karena kita cukup teruji pada beberapa kali krisis, namun pondasi ekonomi cukup kuat," imbaunya.

Aria Bima juga menjelaskan bahwa derasnya aliran uang di daerah turut berdampak pada kuatnya pondasi ekonomi dalam negeri. Beberapa diantaranya yakni dana desa, penyaluran kredit usaha rakyat, dan berbagai program pemerintah seperti program keluarga harapan dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Kebijakan fiskal selama pemerintahan Presiden Jokowi sangat memastikan arus uang luber ke bawah. Selain itu, 99 persen struktur tenaga kerja ada di UMKM, bukan di industri menengah dan besar. UMKM inilah yang relatif bertahan, apalagi jalur uang berputar di daerah," jelasnya.

Pihaknya memperkirakan resesi tersebut tidak lepas dari proses pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang belum usai dan transportasi logistik dunia yang belum mengarah ke keseimbangan baru. "Untuk Indonesia beberapa tanda perubahan harga kebutuhan pokok seperti gandum dan kedelai yang mulai liar tak terkendali, bisa karena suplai jalur logistik. Jadwal kontainer juga masih perlu ada proses penyesuaian antar pelabuhan," jelasnya. • **aha**



FOTO: QM/PDI

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



My Esti: Pemerintah DIY Perlu Bersinergi Turunkan Angka Kemiskinan

Situasi Pandemi Covid-19 membuat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin meningkat. Berdasarkan presentasi Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan DIY pada bulan September 2021 sebesar 11,91 persen lebih tinggi dari kemiskinan nasional yaitu 9,71 persen.

Diketahui, pada kurun waktu 2013-2019 jumlah penduduk miskin di DIY mengalami penurunan sebanyak lebih dari 104 ribu jiwa. Dari tahun 2013 sebanyak 553,07 ribu jiwa dan menjadi 448,47 ribu jiwa di tahun 2019. Dan pada tahun 2020 penduduk miskin kembali meningkat menjadi 475,72 ribu jiwa, dan semakin naik menjadi 506,45 ribu jiwa di tahun 2021.

"Kondisi ini menjadi perhatian kami, untuk itu saya meminta semua pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan bersinergi dalam menjawab tantangan ini," kata Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijayanti melalui rilis media yang diterima **Parlementaria**, Selasa (11/10).

Dijelaskan My Esti, dalam menangani kemiskinan, pemerintah melalui Kementerian Sosial telah membuat program Bantalan Sosial. Namun, masih kata My Esti, dalam menurunkan angka kemiskinan Pemerintah Daerah juga perlu melakukan hal serupa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"DIY dengan Rencana Pendapatan dalam APBD TA 2023 sebesar Rp5,71 triliun dan Dana



FOTO:LIST/PDT

Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijayanti saat melakukan kunjungan langsung ke rumah warga yang belum sejahtera (miskin) di DIY.

”

PEMERINTAH MELALUI KEMENTERIAN SOSIAL TELAH MEMBUAT PROGRAM BANTALAN SOSIAL

Keistimewaan (Danais) sebesar Rp1,42 triliun menjadi tumpuan dan harapan bersama untuk mampu secara lebih kuat mendorong pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan yang sejalan dengan Undang-Undang tentang Keistimewaan," katanya.

Legislator F-PDI Perjuangan itu menginginkan D.I. Yogyakarta menjadi daerah dengan usia harapan hidup dan indeks kebahagiaan yang tinggi sekaligus menjadi daerah

yang sejahtera ditandai dengan kemiskinan yang lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional. "Untuk itu semua pihak perlu bersinergi dan berkolaborasi untuk menjawab tantangan ini," tegasnya.

Dihari itu, Legislator daerah pemilihannya Daerah Istimewa Yogyakarta itu juga melakukan kunjungan langsung ke rumah warga yang belum sejahtera (miskin) dengan kepala keluarga seorang nenek dengan 4 cucu yang tinggal bersamanya termasuk 2 cucu dari salah satu anaknya yg masuk kategori ODGJ.

Potret keluarga yang dapat dikategorikan masuk sebagai kemiskinan mutlak karena tidak mampu mencukupi kebutuhan primernya sendiri. Keluarga ini hanya salah satu dari sekian banyak masyarakat di DIY yg masuk kategori miskin yang membutuhkan bantuan sosial dari negara. • **rnm/aha**



Fikri Faqih Minta Pemerintah Segera Penuhi Hak Korban Kanjuruhan

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Pemerintah

untuk segera memenuhi hak para supporter yang menjadi korban dalam tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Menurutnya, para penonton merupakan khalayak yang memiliki hak dan kewajiban dalam arena pertandingan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) tentang Keolahragaan.

"Hak penonton, kemudian supporter itu semuanya diatur. Dan karena mereka sudah membayar tiket, maka bagaimana supaya yang meninggal itu bisa mendapat santunan, sedangkan bagi yang sakit, bagaimana supaya bisa

mendapatkan jaminan perawatan yang optimal," ujar Fikri dalam keterangan yang diterima oleh **Parlementaria**, Senin (10/10).

Lebih lanjut, Fikri menjelaskan bahwa tragedi Kanjuruhan perlu diusut secara tuntas untuk mengetahui penyebab-penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut.

Wakil Ketua
Komisi X DPR RI
Abdul Fikri Faqih.

"Tragedi Kanjuruhan adalah tragedi yang sangat tragis, lebih parah dari peristiwa di Liverpool, Inggris yang memakan 90 korban. Oleh sebab itu, perlu diusut sesegera mungkin," ungkap Politisi Fraksi PKS ini.

la pun menyebut bahwa Komisi X berencana mengundang PT Liga Indonesia Baru, PSSI, dan Kemenpora untuk membahas tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang yang terjadi pada 1 Oktober lalu tersebut. "Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan, Komisi X bisa menghadirkan semua pemangku kepentingan yang berkaitan untuk membantu menyelesaikan masalah. Kemudian, memutuskan bagaimana proses pemulihan, serta bagaimana kemudian rencana perbaikan ke depannya", pungkas Legislator Dapil Jawa Tengah IX tersebut. ●

hal/aha

”

**TRAGEDI
KANJURUHAN
PERLU DIUSUT
SECARA
TUNTAS UNTUK
MENGETAHUI
PENYEBAB-
PENYEBABNYA
DAN SIAPA YANG
BERTANGGUNG
JAWAB**



FOTO: DEP/PTD

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Bahas RUU Kesehatan, Baleg Undang Organisasi Profesi Kesehatan

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan.

Dijelaskan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas RUU tentang kesehatan merupakan usulan baru dalam RUU perubahan Prolegnas Prioritas 2022 yang akan dibahas dengan metode Omnibus Law. "Kami mengundang organisasi profesi di bidang kesehatan untuk meminta masukan pembahasan RUU tentang kesehatan ini," katanya saat memimpin RDPU di ruang rapat Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/10).

Adapun beberapa isu yang kami (Baleg) ingin perdalam dalam pertemuan ini diantaranya mengenai

redefinisi tentang organisasi profesi. "Kami berharap nantinya setiap tenaga kesehatan hanya memiliki satu organisasi profesi," ungkapnya.

Isu selanjutnya menyangkut penerbitan STR. "Ini terkait praktik kedokteran atau SIP, kami minta tanggapannya," kata Supratman. Kemudian, ia bilang, BPJS nantinya juga akan masuk dalam ketentuan yang diatur dalam RUU kesehatan serta manfaat medis sesuai kebutuhan masyarakat.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Slamet Budiarto mengatakan PB IDI menolak RUU Kesehatan Omnibus Law masuk dalam program Legislasi

Nasional (Prolegnas) tahun 2023. Menurutnya, tidak ada urgensi untuk membahas RUU kesehatan Omnibus Law. Lebih dari itu, menurut IDI yang dibutuhkan saat ini adalah Undang-Undang (UU) Sistem Kesehatan Nasional.

"Intinya, IDI akan membantu negara untuk menyusun sistem kesehatan nasional yang kompleks, yang komprehensif, tapi bukan dalam bentuk Omnibus Law dengan mencabut UU Praktik Kedokteran," katanya. Slamet menambahkan, DPR dapat memperbaiki sistem kesehatan nasional dengan merevisi Peraturan pelaksanaan dari UU Praktik Kedokteran namun bukan dengan mencabut UU Praktik Kedokteran dan memasukkannya ke dalam UU Kesehatan omnibus law.

• rnm/aha

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas saat memimpin RDPU di ruang rapat Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/10).



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: DEVI/PDT

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera usai Sesi Pertama P20 "Accelerating Sustainable Development and Green Economy" di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10).

Mardani Ali Sera: Perlu Adanya Kesamaan 'Framework' untuk Hadapi Krisis Global

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menjelaskan perlu adanya framework bersama antar negara untuk menghadapi krisis global. Menurutnya, *Parliamentary Speakers' Summit* (P20) kali ini menjadi momen yang efektif untuk menyamakan framework tersebut.

"Intinya semua sadar kondisi tidak sedang baik-baik saja, dan level krisisnya bukan level krisis regional atau nasional tapi global. Jadi perlu ada framework bersama. Kami merasakan semuanya semangat tadi," kata Mardani saat ditemui saat sela-sela Sesi Pertama P20 'Accelerating Sustainable Development and Green Economy' di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10).

Dijalankannya, dalam agenda P20 ini banyak negara yang bisa diajak kerja sama dan berbagi pengalamannya dalam meningkatkan kesejahteraan yang selaras dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs).

"Kita sudah punya contoh teladan bagaimana dalam waktu singkat bisa menaikkan SDGs, di Cina dalam jumlah penduduk yang sedemikian besar, dia siap untuk best practices-nya seperti apa. Tadi dari Inggris juga tadi menyampaikan bagaimana mereka punya kesiapan untuk bekerja sama secara multilateral. Namibia tadi bagus mengangkat tentang bagaimana SDGs bisa dicapai khusus buat negara-negara berkembang, afrika khususnya," papar Mardani.

Dalam kesempatan yang sama, Politisi Fraksi PKS ini memuji

pidato Presiden Joko Widodo yang menggambarkan langkah terbaik Indonesia untuk meningkatkan SDGs. "Intinya kita harus rendah hati dan betul-betul menurunkan ego tadi pesannya dan kita harus berdiri diatas kaki sendiri lebih dahulu. Tadi Bu Isma Yatun (Ketua BPK) menyampaikan apa yang sudah dibuat oleh Indonesia, akan banyak badai tapi kapal kita kapal yang kuat Inshaallah," sambungannya.

Oleh karena itu menurutnya, untuk mendukung hal ini DPR RI perlu belajar dari negara-negara yang dianggap berhasil mencapai target SDGs dan mulai memfokuskan fungsi-fungsinya, seperti meningkatkan kualitas perundang-undangan, pemfokusan penganggaran, dan pengawasan setiap program kegiatan eksekutif yang harus berujung kepada kesejahteraan rakyat.

"Kayak misalkan, Krisis covid 19 itu tidak satupun negara yang pernah mengalami 100 tahun terakhir, tapi ada beberapa negara yang sukses kayak Selandia Baru, Australia, dan beberapa negara kayak Korea Selatan juga bagus. itu mereka sharing di regulasi. Tetapi budgeting juga tadi diangkat tentang bagaimana betul-betul fokus anggaran itu people to people, betul-betul jangan lagi ada proyek-proyek mercusuar," jelasnya. • **we/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Dampak Inflasi, **BAKN** Minta Pemerintah Kaji Ulang Batas Garis Kemiskinan

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis

Byarwati meminta pemerintah mengkaji ulang batas garis kemiskinan sebagai dampak inflasi seiring melonjaknya harga bahan pokok karena kenaikan harga BBM. Menurutnya, kesulitan yang dialami masyarakat saat ini tidak hanya terjadi di daerah akan tetapi juga di kota besar.

"Kemiskinan sudah nampak secara kasat mata di lapangan," ujar Anis dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria beberapa waktu lalu. Anis mengingatkan bahwa dalam laporan 'East Asia and The Pacific Economic Update October 2022', Bank Dunia mengubah batas garis kemiskinan yang mengacu pada keseimbangan kemampuan berbelanja pada tahun 2017.

Sementara, basis perhitungan yang dipergunakan Bank Dunia sebelumnya adalah keseimbangan kemampuan berbelanja pada tahun 2011. Dalam basis perhitungan terbaru ini, Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan ekstrem dari US\$1,9 menjadi US\$2,15 per kapita per hari.

Anis menjelaskan bahwa Indonesia tidak serta merta

harus mengacu kepada standar Bank Dunia tersebut. Menurutnya, BPS telah memiliki standar tersendiri mengukur Garis Kemiskinan, Di mana, berdasarkan pada garis kemiskinan yang terefleksi dari nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan individu dalam memenuhi kebutuhan pokok selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.

Diketahui, Garis Kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Pada Maret 2022 Garis kemiskinan yang digunakan BPS tercatat Rp505.469,00 per kapita per bulan, dengan komposisi GKM sebesar Rp374.455 (74,08 persen) dan GKNM sebesar Rp131.014 (25,92 persen). Sehingga, pengeluaran minimum untuk menentukan Garis Kemiskinan sebesar Rp505.469.

Oleh karena itu, Anis menekankan agar indikator yang digunakan dalam pemetaan hendaknya dirumuskan lebih tajam lagi. Ia mempertanyakan angka Rp505.469 per kapita per bulan sebagai batas garis kemiskinan yang dipakai oleh BPS.

"Kita perlu meninjau kembali apakah angka tersebut masih relevan dengan situasi saat ini dimana masyarakat masih terdampak oleh pandemic ditambah dengan inflasi yang sangat tinggi," tuturnya. Mengamati kondisi lapangan, angka Rp505.469 per kapita per bulan ini sangat jauh dari memenuhi kebutuhan pokok," kata Politisi Fraksi PKS ini.

Mengenai penentuan Garis Kemiskinan ini akan berkaitan langsung dengan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Regsosek merupakan pemutakhiran data yang terintegrasi, pemetaan penerima manfaat yang terpusat. Oleh karena itu, Anis menegaskan sangat penting untuk membuat indikator yang tepat terkait garis kemiskinan. • rdn/aha

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati.



FOTO: MUN/PDT



MKD Selenggarakan Seminar Nasional Hak Imunitas Wakil Rakyat

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyelenggarakan seminar nasional bertemakan, 'Hak Imunitas Wakil Rakyat'. Seminar yang berlangsung di Jakarta, Senin (3/10) ini mengundang Pimpinan DPRD dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Provinsi seluruh Indonesia.

Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun mengatakan, tujuan acara guna mendapatkan masukan dari ahli dan kepolisian mengenai Hak Imunitas Wakil Rakyat. "Tujuan dari acara ini untuk mendapatkan masukan mengenai Hak Imunitas Anggota Dewan agar tidak ada kesalahpahaman di lapangan," Adang Daradjatun saat memberikan sambutan.

”

**HAK IMUNITAS YANG
DIDAPAT HARUS
DIBARENGI DENGAN
ETIKA-ETIKA YANG BAIK.**

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang (UU), kata Adang, penegakan hak imunitas yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. "Berdasarkan Undang-Undang Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis," urainya.



FOTO: TN/PDT

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun saat memberikan sambutan dalam seminar nasional bertemakan, 'Hak Imunitas Wakil Rakyat' di Jakarta, Senin (3/10).

Hal itulah yang perlu ditegaskan dan dipahami bersama bahwa Anggota DPR dilindungi dengan hak imunitas, namun Adang menegaskan hak imunitas yang didapat harus dibarengi dengan etika-etika yang baik. "Ini yang perlu digaris bawahi jangan sampai hak imunitas yang

didapatkan tidak diikuti dengan etika yang ada," pungkasnya.

Untuk itu Adang menyebutkan diperlukan dukungan kelembagaan, baik itu lembaga DPR maupun lembaga pendukung. Dukungan tersebut meliputi cara pandang, persepsi dan misi yang sama tentang Hak Imunitas Wakil Rakyat. • **tn/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya





FOTO: MRI/AVL

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kalsel.

Nihayatul Wafiroh: Angka Stunting Kalsel Masih Tinggi

Komisi IX DPR RI dalam Kunjungan Kerja Reses kali ini mengunjungi Kalimantan Selatan (Kalsel). Dalam kunjungan kali ini Komisi IX mengawasi program kesehatan yang sudah berjalan di tengah masyarakat Kalsel dan mendapati tingginya angka *stunting* di provinsi tersebut.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menggarisbawahi permasalahan tingginya angka

stunting di Kalsel ini melebihi persentase *stunting* nasional. Belum lagi tingginya angka kematian ibu dan kematian bayi, dimana ini terjadi biasanya berkaitan dengan pernikahan dini.

"Yang kedua ada banyak catatan dari hasil diskusi kita tadi terutama dari bidang kesehatan juga Tenaga kerja, angka *stunting* masih cukup tinggi di angka 30 persen angka ini masih di atas persentase nasional yaitu 24,4 persen, padahal kita punya

mimpi tahun 2024 nanti bisa turun angka *stunting* ini hingga belasan persen," urai Ninik, sapaan akrab Nihayatul usai memimpin diskusi di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kalsel, Selasa (11/10).

Hal itu diperparah dengan angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih cukup tinggi 28 atau 21 per 100.000 kelahiran. "Ini pasti related (berkaitan) dengan pernikahan dini yang tinggi, pernikahan dini itu pasti efeknya pada angka kematian ibu dan angka kematian bayi", imbuh Ninik.

Politisi Fraksi PKB ini mengatakan variasinya persoalan *stunting* mulai dari minimnya pendidikan, budaya serta akses kesehatan yang terbatas juga dengan asupan gizinya yang kurang diperhatikan. Untuk itu pencarian terhadap akar masalah *stunting* di Kalsel sangatlah penting. ● **mri/aha**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Peserta Parja Harus Aktif Edukasi Masyarakat Soal Pentingnya Menjaga Data Pribadi

Setjen DPR RI di Tahun 2022 ini kembali menggelar Parlemen Remaja dengan tema 'Generasi Sadar Privasi, Dataku Tanggung Jawabku'. Tema ini dinilai sangat relevan, apalagi Bangsa Indonesia baru-baru ini dihebohkan oleh Hacker Bjorka yang membocorkan data-data penting diantaranya milik para pejabat negara.

Deputi Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono mengungkapkan, kontribusi para remaja sangat ditunggu-tunggu dalam mengedukasi lingkungannya untuk menjaga data miliknya masing-masing. Tak hanya itu, ia berharap para peserta Parja 2022 tidak hanya mendiskusikan, tetapi mampu mengimplementasikan agar masyarakat di lingkungannya masing-masing untuk lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadi.

"Ini adalah tema yang sangat update, sangat kekinian sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini," ucap Sumariyandono kepada Parlemen Remaja usai membuka secara resmi Parlemen Remaja 2022 di Ruang Sidang Wisma DPR RI, Bogor, Jawa Barat, Senin (10/10).

Meskipun saat ini adalah era keterbukaan informasi ini, bukan berarti data-data pribadi masyarakat bisa dengan gampang untuk disebarluaskan. Dono menekankan, upaya-upaya sebagai wujud perlindungan data menjadi poin penting untuk disampaikan kepada para peserta Parja agar mereka melakukan perubahan. "Mereka



Deputi Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono secara simbolis membuka secara resmi Parlemen Remaja 2022 di Ruang Sidang Wisma DPR RI, Bogor, Jawa Barat, Senin (10/10).

harus berupaya melindungi data mulai dari diri masing-masing, lingkungan keluarga serta lingkungan pergaulannya, ujar Dono.

Sebelumnya, Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI Suratna, dalam laporannya menyatakan Parlemen Remaja yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman politik dan demokrasi di Indonesia kepada generasi muda. Bukan tidak mungkin ada diantara para peserta Parja yang menjadi Anggota DPR RI kelak.

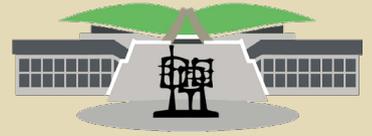
"Rekrutmen sangat ketat, mereka melalui dengan membuat video, esai sesuai dengan tema.

Mereka adalah remaja-remaja yang hebat dan luar biasa. Mereka akan mendiskusikan terkait keamanan data pribadi. Tema ini diambil agar anak-anak muda memanfaatkan IT secara positif dan bertanggung jawab," pungkasnya.

Diketahui, DPR RI, pada Sidang Paripurna yang dilaksanakan, Selasa (20/9) telah mengesahkan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi undang-undang. Regulasi tersebut menjadi payung hukum atas pemanfaatan data pribadi milik masyarakat yang tak jarang disalahgunakan. Tentu saja, edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga data tetap perlu dikedepankan. ● **es**

Scan QR untuk berita selengkapnya





Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat menghadiri Sidang *Inter-Parliamentary Union (IPU)* ke-145 di Rwanda. FOTO: ISTIMEWA/NVL



Persatuan Pensiunan Pegawai Setjen (P3S) DPR RI saat pembukaan Program Khatam Al-Qur'an putaran ke-96 di Aula Serbaguna Masjid Baiturahman DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10). FOTO: OJI/NVL



Tim Kunjungan Kerja Parja 2022 saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka menyerap aspirasi terkait pengelolaan dan keamanan data di kantor PT Tokopedia, Jakarta, Rabu (12/10). FOTO: ERMAN/NVL

